

**RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
2020 – 2024 REVISI**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan arahan kebijakan Kemdikbud, Riset dan Teknologi Politeknik Negeri Sriwijaya secara terus menerus melakukan pengembangan dan perubahan dalam pendekatan perencanaan dan kegiatan operasional yang dilandasi pemahaman pengkajian yang mendalam tentang kondisi internal dan eksternal yang berkembang dewasa ini dengan menganalisa kekuatan, kelemahan, ancaman dan tantangan yang mungkin timbul yang dituangkan didalam Rencana Strategis Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2020-2024 berdasarkan Ketetapan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor: 3626/PL6.4.2/SK/2020 tanggal 7 Juli 2020.

Perkembangan Teknologi dunia industri secara global sangat pesat, sehingga dari rencana strategis Jangka Panjang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2020-2024) dan merupakan dasar acuan untuk pengembangan Politeknik Negeri Sriwijaya secara global yang dituangkan dalam bentuk program jangka pendek berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan pedoman pelaksanaan program pendidikan tahun tersebut.

Rencana Strategis 2020-2024 telah mengalami 2 kali revisi terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama penyesuaian dengan kaidah penyusunan Renstra Kemendikbud 3/M/2021 dan yang revisi kedua dengan terbitnya Kemendikbudristek 210/M/2023.

Demikian kiranya Rencana Strategis 2020-2024 ini dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Plt. Direktur,
Politeknik Negeri Sriwijaya



Dr. Benny Bandanadjaja, S.T., M.T.
NIP. 197009302000031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR ISTILAH	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum	
1. Sejarah singkat Politeknik Negeri Sriwijaya.....	1
2. Latar belakang penyusunan renstra 2020-2024.....	2
3. Latar belakang revisi renstra pertama renstra dgn. Kepmendikbud 3/M/2021...	2
4. Latar belakang revisi renstra kedua	3
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Polsri 2020-2024	3
D. Kondisi Internal	12
E. Potensi Permasalahan	20
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	
A. Visi Polsri	24
B. Misi Polsri.....	25
C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	25
D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi	29
B. Kerangka Regulasi	29
C. Kerangka Kelembagaan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Politeknik Negeri Sriwijaya	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja	38
B. Kerangka Pendanaan	42
BAB V PENUTUP ...	
A. Pedoman Pelaksanaan	48
B. Kaidah Pelaksanaan	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi - Politeknik Negeri Sriwijaya	31
------------	---	----



DAFTAR ISTILAH

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ASEAN	Association of South East Asia Nations
ASN	Aparatur Sipil Negara
BAN	Badan Akreditasi Nasional
ASEAN	Association of South East Asia Nations
BMN	Barang Milik Negara
BNSP	Badan
DU/DI	Dunia Usaha Dunia Industri
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	Indikator Kinerja Program
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
PAN RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LPMP	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NKA	Nilai Kinerja Anggaran
Polsri	Politeknik Negeri Sriwijaya
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional
S1	Strata Satu
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker	Satuan Kerja
SDM	Sumber Daya Manusia
Setjen	Sekretariat Jenderal
SK	Sasaran Kegiatan
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuru
Tupoksi	Tugas Pokok dan Fungsi
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UTN	Uji Tulis Nasional
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	Wilayah Bebas dari Korupsi
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
ZI	Zona Integritas



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Analisis SWOT	21
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	26
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran	27
Tabel 2.3	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran/Utama	28
Tabel 3.1	Kerangka Regulasi	30
Tabel 3.2	Tugas Pokok Organisasi di Polsri.....	31
Tabel 4.1	Matrik Kinerja 2020 (Kepmendikbud 754/P/2020.....	38
Tabel 4.2	Matrik Kinerja 2021-2022 (Kepmendikbud 3/M/2021).....	39
Tabel 4.3	Matrik kinerja 2023-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023.....	41
Tabel 4.4	Realisasi dan Rencana Proyeksi tahun 2020-2024	42
Tabel 4.5	Sasaran Kinerja dan Pagu anggaran Polsri 2020-2023.....	42
Tabel 4.6	Kerangka Pendanaan 2024	43
Tabel 4.7	Hubungan SK, IKU, RO dan Komponen Kegiatan	43



BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Sejarah Singkat

Peningkatan peran dan kemampuan perguruan tinggi vokasi secara institusi harus terus dilakukan untuk dapat semakin menjamin penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan melalui berbagai program pengembangan yang dilakukan secara terarah, bertahap dan berkelanjutan. Perguruan tinggi vokasi yang berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi yang sedang dikembangkan/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api diharapkan dapat berkontribusi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan membangun kerjasama yang baik dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA). Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Vokasi yang telah lama ada di kota Palembang dan merupakan salah satu dari 6 (enam) Politeknik pertama yang ada di Indonesia, Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) telah berdiri sejak tahun 1982 di atas lahan seluas kurang 7,7 Hektar dimana 70% dari total luas lahan merupakan gedung kampus.

Politeknik Universitas Sriwijaya dibuka pada tanggal 20 September 1982 bersama dengan 6 (enam) Politeknik negeri pertama di Indonesia. Keenam Perguruan Tinggi Negeri pertama yang mendirikan Politeknik sesuai Keputusan Dirjen DIKTI Nomor: 03/DJ/Kep/1979 adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya. Pada masa itu, politeknik merupakan lembaga pendidikan tinggi jenjang D3 yang berfokus pada pengembangan penguasaan keahlian dan keterampilan pada bidang-bidang teknik tertentu, khususnya teknik mesin dan teknik sipil. Ahli Madya merupakan gelar jenjang lulusan pendidikan politeknik. Posisinya di dalam hirarki manajemen adalah pada tingkat manajemen menengah (*middle management*) yang berfungsi menjembatani kesenjangan manajerial dalam pengelolaan organisasi antara manajemen tingkat atas (*top management*) yang diisi oleh para sarjana lulusan universitas atau institut dan manajemen tingkat bawah (*low management*) yang diisi oleh para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/O/1998 tanggal 21 September 1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada tahun 1998 Politeknik Universitas Sriwijaya dinyatakan sebagai satuan kerja (Satker) mandiri dengan nama Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri). Statuta Polsri telah mengalami beberapa pembaharuan dengan Kepmendiknas Nomor 200/O/2002



yang diperbarui dengan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2011 dan terakhir saat ini diatur melalui Permenristekdikti Nomor 17 Tahun 2019. Semenjak berdirinya Polsri sebagai Satker juga telah berkembang dalam organisasi dengan diperbaruinya Kepmendiknas Nomor 137/O/2002 menjadi Permendikbud Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya. Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Polsri merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan Pemerintah. Dalam perkembangannya sejalan dengan tujuan dan sasaran Kemendikbud pada 2020- 2024, Polsri saat ini tidak hanya menjalankan program pendidikan jenjang D3 akan tetapi telah memiliki 23 Program Studi yang terdiri 15 bidang rekayasa dan 8 bidang non rekayasa, dengan jenjang pendidikan 11 Program Studi jenjang Diploma Tiga (D3), 11 Program Studi jenjang Sarjana Terapan (D4), serta 1 Program Studi Magister Terapan (S2 Terapan)

2. Latar Belakang Penyusunan Remstra Polsri

Rencana Strategis Polsri 2020-2024 merupakan kelanjutan dari Renstra Polsri 2015-2019 berdasarkan Ketetapan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor: 1554/PL6.4.2/SK/2016.. Pada Renstra 2015-2019 mencakup 7 bidang dengan 10 Sasaran Strategis untuk mendukung 41 program strategis. & Bidang yang menjadi target Renstra 2015-2019 yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat, Sumber daya manusia, Organisasi dan Manajemen, Sarana dan Prasarana, Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerjasama, dan Pendanaan. Ada beberapa bidang yang belum tercapai diantaranya bidang Penelitian dan Pengabdian dimana masih kurangnya dosen yang menulis karya ilmiah pada jurnal Internasional, Sarana Prasarana masih perlu ditingkatkan. Untuk Bidang Sumber daya Manusia terjadi peningkatan yang melebihi target kinerja dimana banyak para dosen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 dan mendapatkan sertifikat kompetensi.

3. Latar belakang revisi renstra pertama dan dgn. Kepmendikbud 3/M/2021

Rencana Strategis Polsri 2020-2024 ini mengalami 2 kali revisi terutama pada peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama penyesuaian dengan kaidah penyusunan renstra Kemendikbud 3/M/2021. Perubahan pada Kemendikbud 3/M/2021 yaitu adanya perubahan definis indikator kinerja yaitu i kata 'lulusan' menjadi 'mahasiswa', pada IKU nomor 2 dan mengganti kata 'lulusan' menjadi 'mahasiswa', pada IKU nomor 3



4. Latar belakang revisi renstra kedua dan dgn. Kemendikbudristek 210/M/2023

Revisi renstra Polsri kedua dengan terbitnya Kemendikbudristek 210/M/2023. Dengan adanya renstra revisi target IKU dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja IKU di Politeknik Negeri Sriwijaya. Perbedaan antara Kepmendikbudristek yang baru dengan Kepmendikbud sebelumnya, terutama pada formula dan definisi operasional yang digunakan pada masing-masing IKU. Pada Kepmendikbudristek 210/M/2023 ditetapkan kebijakan delapan IKU untuk melihat berbagai aspek kualitas perguruan tinggi vokasi di antaranya mahasiswa, dosen, dan penjaminan mutu. menjadikan IKU 2023 sebagai barometer kinerja dan orientasi dalam menyusun dan melaksanakan setiap kebijakan, program, serta kegiatan di Polsri

B. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renstra Politeknik Negeri Sriwijaya 2020-2024 Sbb:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555).
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 721).
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 032/DJ/KEP/1979 tentang Pembentukan Politeknik di 6 (enam) Daerah yang Mempunyai Perguruan Tinggi Negeri.
15. Kebijakan Kemendikbud Tentang Merdeka Belajar: Kampus Merdeka pada tanggal 24 Januari 2020.
16. Kepmendikbudristek 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomer 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Vokasi

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Polsri 2020-2024

C1. Maksud penyusunan Rencana Strategis Polsri 2020-2024 :

- a. Pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Polsri yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategis pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan.



- b. Salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka, menengah; dan Jangka pendek (Tahunan)
- c. Pedoman perencanaan operasional untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

C2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Polsri 2020-2024 :

- a. mengatur distribusi sumber daya terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis
- b. mengukur dan mengevaluasi kinerja dari hasil-hasil yang telah dicapai dan membandingkan antara tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan yang terealisasikan
- c. Mengendalikan kesinambungan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Polsri dari satu periode ke periode berikutnya demi tercapainya visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJP Polsri

D1. Kondisi Internal

Kondisi internal Politeknik Negeri Sriwijaya meliputi tujuh bidang, yaitu organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, mahasiswa dan lulusan, kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, serta kerja sama.

Kebijakan Pengembangan Bidang Tata Kelola

Suatu organisasi pendidikan tinggi yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governence* tercermin dari beberapa ciri yaitu :

- a. Transparansi; yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi.
- b. Kemandirian; yaitu suatu keadaan dimana organisasi dikelola secara profesional tanpa beturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas; yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan organisasi terlaksanan secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban; yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan-peraturan dan aturan-aturan lembaga Polsri yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.



- d. Kewajaran (Fairness); yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memnuhi hak-hak stakeholder di dalam organisasi yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, Polsri mempunyai organisasi utama yang terdiri dari : Direktur dan Wakil Direktur, Senat Polsri, Jurusan/ Program studi, Bagian dan unit penunjang lainnya. Direktur yang dibantu oleh para Wakil Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif dan edukatif Politeknik. Senat Polsri merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Politeknik. Jurusan/ Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Bagian yang ada saat ini ada dua yaitu 1) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi Akademik, 2) Bagian Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Selain dari pada itu terdapat unsur penunjang antara lain Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (PPPM), Badan Penjaminan Mutu (BPM), Pusat Informasi dan Humas (PIH), Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional (P3AI), Satuan Pengawasan Internal (SPI), Unit penunjang lainnya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian yang terdiri atas: a) UPT Perpustakaan, b) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan, c) Unit pelaksana teknis lainnya. Pengembangan/perbaikan struktur organisasi dan tata kerjanya akan terus dilakukan sesuai kebutuhan dalam menghadapi tantangan masa depan menuju Polsri unggul dan terkemuka.

Mahasiswa dan Lulusan

Pendidikan di Polsri diarahkan untuk mendorong terciptanya kompetensi yang tinggi bagi para lulusannya melalui pencapaian keunggulan pendidikan vokasi. Keterpaduan kurikulum pendidikan (Program Studi) mulai dari jenjang D III, D IV (Sarjana Terapan), S2 Terapan serta kelas-kelas kerjasama merupakan ciri khas yang perlu dikembangkan di Polsri. S2 terapan dengan program studi Energi Terbarukan akan merupakan ciri khas dalam pengembangan pendidikan kedepan.

Pendidikan di Polsri dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi di tingkat teknikal maupun manajerial. Peningkatan mutu akan diiringi dengan pengembangan program studi unggulan dan kelas- kelas khusus kerjasama baik



dengan Pemerintah maupun dengan industri dalam upaya memenuhi tuntutan kompetensi yang diinginkan. Pengembangan kurikulum program studi diarahkan untuk memenuhi standar baku yang ditetapkan pemerintah dan updating kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sehingga lulusan Polsri memiliki kompetensi yang mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Perluasan akses pendidikan bagi mahasiswa domestik dan mahasiswa asing menjadi salah satu prioritas pengembangan Polsri. Sejalan dengan kegiatan internasionalisasi, akses pendidikan bagi mahasiswa asing juga sudah mulai dikembangkan. Beberapa mahasiswa asing telah mengikuti proses pembelajaran, mereka berasal dari negara Tajikistan, Sudan, dan Vietnam.

Kegiatan pembelajaran dapat dikembangkan untuk melayani kebutuhan keahlian atau keprofesian tertentu dengan membekali peserta didik agar mencapai kompetensi baik *hard skill* maupun *soft skill*. Polsri menyiapkan pendamping ijazah berupa sertifikat kompetensi bagi lulusan yang dikeluarkan oleh BNSP dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polsri. Program studi perlu diberdayakan untuk mencapai keunggulan akademik baik melalui pengembangan staf pengajar maupun kerjasama dengan lembaga pemerintah dan industri. Pencapaian keunggulan akademik ini tetap menjadi landasan utama dalam melakukan Kerjasama program studi atau pelatihan dengan pihak-pihak eksternal Polsri.

Kurikulum

Penyusunan kurikulum program studi di Politeknik Negeri Sriwijaya disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Polsri. Penyusunan kurikulum juga mempertimbangkan urgensi perubahan kebutuhan masyarakat, Profil Program Studi, dinamika kelimuan dan adanya perubahan regulasi tentang kurikulum. Kurikulum disusun untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal agar siap terjun ke masyarakat dan industri dengan muatan keilmuan sesuai program studi dan ciri khas yang dimilikinya.

Kurikulum pada program studi di Polsri ditinjau secara periodik sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu Polsri. Kurikulum berisikan seluruh standar kompetensi lulusan yang terdiri atas kompetensi utama dan kompetensi pendukung, yang harus ditempuh untuk pencapaian kompetensi lulusan yang dituangkan kedalam Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Pembelajaran mata kuliah. Mata Kuliah yang tercantim pada kurikulum dituangkan kedalam 4 kelompok yaitu sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus. Kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan dan cakupan kedalaman materi. Kurikulum juga disusun dengan mempertimbangkan terbentuknya keterampilan yang



bisa dipelajari dan terukur (*hardskills*) dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*softskills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dunia kerja.. Monitoring dan evaluasi atas kualitas kurikulum dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Polsri

Proses pembelajaran dilakukan sesuai kurikulum dengan suasana pembelajaran dan fasilitas yang mendukung antara lain *hot sport area*, ruang AC, menggunakan media pembelajaran berbasis IT, Laboratorium dan Bengkel. Mahasiswa dan dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan terencana, dosen diwajibkan menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester.dan dosen menyusun kontrak perkuliahan dan menjabarkan komponen-komponen penilaian serta memberikan penilaian secara adil dan transparan terhadap mahasiswa. Kontrol pembelajaran melalui absensi mahasiswa oleh dosen dikelas dan kontrol pembelajaran berbasis IT didalam SISAK Polsri (Sisak.polsri.ac.id). Kinerja dosen akan dinilai oleh mahasiswa melalui angket yang wajib diisi di akhir semester. Penilaian mahasiswa menjadi umpan balik bagi dosen untuk memperbaiki kinerjanya di semester berikutnya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik.

Suasana akademik dibangun dengan memberikan keleluasaan bagi civitas akademik Politeknik Negeri Sriwijaya untuk memberikan pendapat, saran dan kritik terhadap perbaikan proses aktivitas Tri Dharma. Mahasiswa dapat secara langsung menyampaikan permasalahan yang dihadapi melalui dosen pembimbing akademik, maupun secara langsung kepada struktural jurusan. Selain itu juga dibangun suasana akademis yang terkoordinasi yang diwadahi oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan, BEM, unit-unit kegiatan dan juga kelompok- kelompok kompetensi mahasiswa.

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Misi POLSRI tentang Rencana Program dan Kegiatan tetap menjadi acuan di dalam pengembangan strategi bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. Melaksanakan pendidikan dan mengembangkan inovasi dalam pendidikan lokasi bidang rekayasa dan non rekayasa dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- b. Melaksanakan penelitian bidang rekayasa dan non rekayasa untuk mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian regional dan nasional.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan temuan-temuan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam memecahkan masalah- masalah masyarakat.

Peningkatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan diupayakan untuk menumbuhkan



budaya riset. Kebijakan budaya riset perlu disertai dengan pengembangan sistem penghargaan yang memadai bagi peneliti Polsri yang menyumbangkan pemikiran dan tenaganya dalam penelitian. Penelitian Polsri dalam upaya untuk mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional, akan diarahkan kepada riset unggulan dan strategis nasional dilengkapi dengan eksplorasi dan aplikasi yang lebih mendalam bagi pemecahan masalah-masalah daerah, regional dan nasional.

Kelompok peneliti perlu dibentuk untuk melayani kebutuhan *stakeholder* melalui hasil-hasil penelitian. Kerjasama dengan lembaga riset nasional dan internasional perlu digalakkan untuk meningkatkan percepatan dan dayaguna inovasi. Pengalokasian dana penelitian yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan penelitian dari waktu ke waktu.

Pengabdian kepada masyarakat tidak hanya pada tingkat lokal dengan memecahkan masalah-masalah di daerah, tetapi juga diupayakan pada tingkat nasional. Dikotomi antara penelitian murni dan terapan perlu dihilangkan karena keduanya saling bersinergi dan akuntabilitasnya adalah dari nilai tambah yang diberikan baik bagi kalangan industri maupun ilmiah.

Pada tahun 2021, Polsri melalui P3M telah mulai melaksanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dengan mitra dari luar negeri. Beberapa penelitian telah dilakukan dengan melibatkan peneliti dari Politeknik dan atau Universitas luar negeri, seperti dari Malaysia, dan Philipina.

Kebijakan dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Polsri dan P3M dalam meningkatkan jumlah penelitian, dan hasil penelitian yang berkualitas oleh dosen, dan mahasiswa yaitu:

- a. Melakukan pelatihan ilmiah yang berkala kepada dosen dan mahasiswa;
- b. Melakukan pendampingan dalam proses unggah dokumen proposal;
- c. Melakukan pendampingan yang intensif kepada pengusul tentang penulisan proposal, memberikan trik-trik dalam penulisan;
- d. Pendampingan tentang pengolahan dana sesuai dengan RAB serta PMK;
- e. Adanya pemberitahuan tentang pelaporan dokumen secara langsung kepada tim pelaksana, serta adanya sanksi keterlambatan pengumpulan Laporan Akhir;
- f. Sosialisasi yang secara rutin tentang luaran wajib dan luaran tambahan serta jenis luaran yang harus dipenuhi;
- g. Adanya penangguhan pencairan dana sisa 30% dari total, apabila luaran tidak terpenuhi.



Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Polsri mengacu pada Rencana Strategis PKM 2016-2020, serta Rencana Induk Penelitian (RIP) tahun 2016-2020. Dalam RIP ada 11 prioritas utama program strategis Pengabdian kepada Masyarakat yaitu:

- a. Penerapan Ipteks untuk pengolahan dan pengelolaan sektor energi
- b. Penerapan Ipteks untuk pengolahan dan pengelolaan air dan pangan
- c. Penerapan sistem informasi manajemen, teknologi informasi, dan komputasi pada masyarakat produktif dan non produktif, pada wirausaha dan UMKM, dan pada masyarakat dunia
- d. Penerapan teknologi pada pengolahan dan pengelolaan industri unggulan daerah.
 - 1) Penerapan teknologi material maju dan teknologi tepat guna pada industri kecil, UMKM, industri pengolahan terkait pertanian, peternakan dan perikanan.
 - 2) Perbaikan proses & kapasitas produksi, mutu manajemen akuntansi dan pemasaran pada masyarakat wirausaha, UMKM, dan masyarakat produktif.
 - 3) Perbaikan manajemen produksi, SDM, pengarsipan, promosi, dan pemasaran pada UMKM unggulan daerah, potensi wilayah dan desa.
 - 4) Penerapan teknologi pengolahan limbah dan pencegahan pencemaran oleh industri.
 - 5) Ipteks bagi masyarakat untuk bidang sosial dan humaniora meliputi pembelajaran berbahasa Indonesia/asing yang baik dan benar, pembangunan karakter, agama, hukum, civil society dan seni.
 - 6) Ipteks bagi masyarakat dalam metodologi pembelajaran untuk pendidikan ekstrakurikuler dalam mengatasi masalah di wilayahnya.
 - 7) Penerapan teknologi dan manajemen transportasi dan penanggulangan bencana.

Sarana Prasarana dan Sistem Informasi

Sarana dan prasarana yang berpengaruh besar terhadap efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran perlu ditingkatkan. Penggunaan sarana sebaiknya diarahkan untuk peningkatan utilisasi dan efisiensi. Penggunaan ruang sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang tertuang dalam rencana kerja unit yang terkait. Pemeliharaan sarana akan lebih banyak melibatkan unit pelaksana yang menggunakan sarana tersebut.

Pengembangan lembaga diarahkan untuk mencapai misi lembaga yang diemban, berdampak positif kepada peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dan mendukung terselenggaranya program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Evaluasi diri lembaga, program studi dan bagian/unit secara holistik mesti terus



dilakukan supaya investasi mempunyai dasar yang kuat dan tepat guna serta tepat sasaran. Evaluasi diri menggunakan analisa SWOT merupakan salah satu dasar strategis investasi prasarana, untuk meningkatkan kapasitas Polsri dalam melayani pendidikan dan penelitian. Dalam hal pengembangan lembaga, Polsri juga perlu mencari peluang baru untuk memperluas lahan Polsri juga perlu untuk mencari peluang baru untuk memperluas lahan yang ada, terutama melalui pendekatan terhadap instansi pemerintah daerah dan pusat untuk mendapatkan lokasi tambahan atau baru untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.

Mengingat Polsri sudah berumur lebih dari tiga puluh empat tahun maka perlu dilakukan revitalisasi laboratorium dan bengkel agar peralatan yang sudah tua atau rusak dapat diganti dengan yang baru sehingga kesenjangan pembelajaran laboratorium tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di industri.

Adapun pengembangan sarana dan prasarana Polsri meliputi pembangunan, pengadaan dan perawatan:

- a. Gedung / bangunan utama dan pendukung
- b. Laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan perkantoran.
- c. Sarana dan prasarana pembelajaran
- d. Sarana dan prasarana olah raga dan kesenian
- e. Utilitas (parkir, jalan, masjid, toilet, kantin, air bersih, drainase, resapan air, sarana komunikasi)
- f. Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Kerjasama

Polsri telah melakukan kerjasama diberbagai bidang baik dalam maupun luar negeri. Ini dibuktikan dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) Surat tugas dan laporan pelaksanaan kegiatan. Setiap kerjasama memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh jajaran Polsri (dosen, mahasiswa dan staf) dan pihak kerjasama (perguruan tinggi lainnya, perusahaan/ industri, pemerintah daerah dan kementerian).

Berdasarkan Laporan Kinerja (Lakin) dan LAKIP tahun 2022 kegiatan di berbagai bidang secara keseluruhan mengalami kendala pada masa pandemi covid yaitu antara tahun 2020-2021, Namun pelaksanaan kerjasama dengan mitra meningkat. Untuk tahun 2021 kerjasama yang terjalin dengan mitra ditargetkan hanya 35% dan ternyata terealisasi 100%. Pasca pandemi kegiatan ini juga terus mengalami kenaikan. Penerapan Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) juga mempengaruhi peningkatan kerjasama. Hampir semua program studi melibatkan praktisi



(pengajar dari pihak luar) dalam proses pembelajaran, sehingga kerjasama dengan external bertambah.

Keberhasilan Polsri dalam melaksanakan kerjasama dibuktikan dengan kemudahan mahasiswa dalam melaksanakan praktek/ magang, kemudahan alumni untuk memperoleh pekerjaan, peningkatan IPTEK dan sertifikat keahlian serta adanya peningkatan jumlah kerjasama baik dalam maupun luar negeri. Beberapa perguruan tinggi luar negeri melakukan kegiatan kerjasama secara *continiu* dengan pihak Polsri, seperti pertukaran pelajar, *teaching industry, reasearche coloboration* dan pelaksanaan seminar internasional. Hasil dari kerjasama terlihat dengan peningkatan fasilitas pembelajaran dan fasilitas penunjang lainnya.

Pada tahun 2021 Polsri memperoleh dana hibah SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) selama 2 tahun (2021-2022) dalam pendukung kegiatan *Teaching Factory*. Dengan dana tersebut peralatan penunjang proses pembelajaran serta peralatan pendukung lainnya bertambah. Hal ini juga akan menjamin keberlanjutan kerjasama dengan pihak terkait karena memberikan manfaat yang besar dan nyata bagi pelaksanaan kerjasama

Strategi Pencapaian Standar Kerja Sama

- a. Polsri dan P3M membuat pedoman kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PKM setiap skema PKM setiap tahun.
- b. Polsri menugaskan P3M membuat rencana strategis PKM sebagai peta jalan PKM Polsri.
- c. P3M melaksanakan standar hasil PKM untuk meningkatkan mutu PKM.
- d. P3M membuat kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.

D2. Kondisi Eksternal

Politeknik Negeri Sriwijaya yang berlokasi di Kota Palembang (Sumatera Selatan) dan merupakan salah satu Pendidikan Tinggi di Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Didalam menjalankan aktivitasnya dipengaruhi oleh situasi, regulasi dan kondisi di negara, juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dunia Internasional. Revolusi industri 4.0 dimana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin meluas dan tidak terbatas termasuk pada pendidikan tinggi. Tantangan revolusi industri 4.0 bahkan 5.0 perlu direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global.



Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) khususnya Program Sarjana Terapan Perancangan Jalan dan Jembatan perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut dengan merumuskan kebijakan strategis terkait pengembangan kurikulum sesuai perkembangan bidang ilmunya dan kebijakan pemerintah, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi dan metode pembelajaran hingga inovasi supaya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Terdapat kecenderungan perubahan lingkungan eksternal UPPS dan prodi pada aspek makro: sosial, politik, ekonomi, kebijakan, dan perkembangan IPTEKS, demikian pula pada aspek mikro: pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, *e-learning*, *opencourseware*, kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, serta mitra.

Lingkungan Makro meliputi Aspek Sosial Budaya, Aspek Politik, Aspek Ekonomi, Aspek Kebijakan, dan Aspek IPTEK

A.1. Aspek Sosial Budaya

Polsri berada di kota Palembang yang dikenal sebagai pusat industri kreatif (Kerajinan songket, dan kuliner). Sebagai ibukota Sumatera Selatan, Palembang menjadi pusat kebudayaan Sriwijaya serta memiliki warisan-warisan sejarah (Museum Sriwijaya, Masjid Agung, Keraton Mahmud Badarudin II dll.). Interaksi budaya di kota Palembang memiliki corak keragaman dikarenakan banyak banyaknya pendatang dari luar daerah dan dari luar negeri dengan tujuannya masing-masing seperti berdagang, wisata, kuliah di universitas yang ada di kota Palembang. Politeknik Negeri Sriwijaya berada di kota Palembang yang dikelilingi oleh industri seperti PT PUSRI, PERTAMINA, PT Semen Baturaja, PTBA, PT PLN dll. Kondisi-kondisi diatas mempengaruhi pola interaksi secara sosial dimana terjadi interaksi antar masyarakat yang membawa kultur budaya masing masing. Selain itu jenis dan tuntutan pekerjaan juga membawa pola sosial budaya yang berbeda. Interaksi sosial budaya yang beragam (multicultural interaction) ini merupakan modal berharga bagi mahasiswa di Polsri (khususnya mahasiswa PJJ) yang mana mayoritas alumninya bekerja di perusahaan multinasional yang berlokasi di seluruh Indonesia.

A.2. Aspek Politik

Polsri sebagai salah satu Pendidikan Tinggi di Indonesia secara nasional dipengaruhi oleh adanya kebijakan atau keputusan menteri khususnya Mendikbudristek seperti regulasi pembelajaran MBKM. Regulasi nasional terkait MBKM, menuntut Polsri untuk membuat kebijakan dan mengelola semua prodinya untuk menyesuaikan kurikulum.

Dengan adanya penambahan pada struktur organisasi yang memayungi dunia



Pendidikan Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) maka perkembangan PT Vokasi di Indonesia lebih fokus dan terprogram. Polsri berperan serta dalam mengikuti program MBKM dimana pada tahun 2022 ada 19 mata kuliah mendapatkan hibah praktisi mengajar, selain itu Polsri juga mengambil kesempatan untuk pengembangan SDM dosennya melalui kursus bersertifikat kompetensi yang disediakan DIKSI melalui kompetisi. Mengikuti program mahasiswa magang bersertifikat, dan program mengajar di lembaga pendidikan. Polsri juga meraih kesempatan dari kementerian KOMINFO seperti Program *Vocational School Graduate Academy* (VSGA). Kegiatan VSGA yang berkategori PkM untuk Pendidikan tambahan bagi alumni SMK yang berlatar belakang Teknik Informatika dan sudah terlaksana selama 3 periode. Selain itu juga dari sisi SDM direktur Polsri juga menjabat sebagai ketua Forum Politeknik Seluruh Indonesia.

Keaktifan Polsri di beberapa aspek dalam merespon dengan cepat regulasi nasional sebagai aspek politik, berdampak baik di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan serta animo masyarakat untuk berkuliah di Polsri.

A3. Aspek Ekonomi

Globalisasi akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik internasional, regional (ASIA), nasional (pertumbuhan ekonomi Indonesia), dan lokal khususnya Sumatera Selatan sebagai tempat keberadaan Polsri dan sebagai pemberi intake yang dominan. Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 591,60 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 343,48 triliun (Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan).

Dengan didominasinya mahasiswa Polsri berasal dari Sumatera-Selatan dengan variasi latar belakang keluarga dari ekonomi rendah ke tinggi, ini mempengaruhi kebijakan Polsri dalam menghadapi tantangan ekonomi di masyarakat. Animo masyarakat untuk kuliah dikampus Polsri cukup besar ini dapat kita lihat Sistem penerimaan uang kuliah tunggal di Polsri. Dari jumlah mahasiswa baru tahun akademik 2022/2023 sebanyak 3277 orang mahasiswa, 7% mahasiswa mendapatkan KIP dan sisanya pembayaran melalui sistem pembayaran kuliah tunggal bervariasi 1 sampai 8 dengan nominal terendah 500.000,-rupiah dan tertinggi 9.000.000,-.

Melihat kondisi ekonomi yang baik tersebut dan berangkat dari semangat membangun kualitas layanan yang sangat baik, tahun 2022 Polsri mengajukan perubahan status perguruan tinggi menjadi BLU (Badan Layanan Umum). Melalui perubahan status menjadi BLU, Polsri diharapkan mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan internasional, mampu mengatasi kelemahan dan ancaman perguruan tinggi, serta



optimal dalam menyediakan layanan terbaik bagi mahasiswa dan *stakeholders*.

A.4 Aspek Kebijakan

Penyelenggaraan Pendidikan tinggi merujuk pada peraturan dan kebijakan Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar nasional Pendidikan tinggi, pasal 3 ayat 3 mengatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- a. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
- c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
- d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Hal ini mendorong Polsri menetapkan Kebijakan Mutu, memperbaharui 24 standar wajib tridharma yang dimilikinya dan menambahkan 3 standar lain (Visi Misi, Kerjasama, Mahasiswa) sebagai pelampauan horizontal dari SN Dikti dan beberapa kebijakan untuk mengikuti perkembangan eksternal sebagai peluang perbaikan dan perkembangan Polsri.

Kedua, Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) bab 2, pasal 6 menjelaskan bahwa Kedudukan Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini membawa implikasi dan tantangan bagi UPPS Polsri dan PJJ untuk meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikannya. Di antaranya peningkatan kinerja pengelolaan akademik, keuangan, sumber daya, perluasan jaringan kerjasama guna meningkatkan daya saing lulusan. Usaha tersebut menghasilkan berbagai prestasi, yakni Polsri telah berhasil menciptakan 3 Profesor dalam waktu 3 tahun, menghasilkan 37 Doktor, 63,7% dosen Polsri bersertifikat SERDOS, menghasilkan Dosen-Dosen bersertifikat asesor kompetensi, dan menghasilkan Dosen-Dosen bersertifikat kompetensi teknis. Tenaga Kependidikan juga berkesempatan mendapatkan kegiatan peningkatan keterampilan (via kursus). Sebagian tenaga kependidikan Polsri juga mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S2.



Berdasarkan capaian-capaian tersebut, Polsri sangat kompetitif dalam menghasilkan mutu lulusan. Capaian ini mendukung upaya Polsri mengubah status menjadi BLU (Badan Layanan Umum) sehingga di masa depan Polsri semakin berkembang dan maju. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dari Mendikbud merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi, diantaranya: Peraturan Mendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

A5. Aspek IPTEK

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di berbagai bidang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Polsri sebagai UPPS, untuk terus menerus memanfaatkan IPTEK dan menyesuaikan sistemnya sebagai bagian dari fasilitas atau layanan. Sebagai contoh, adalah fasilitas perpustakaan Polsri yang bukan saja memiliki buku hardcopy, tetapi menyediakan juga berbagai e-book dan akses jurnal secara luas dan cepat melalui internet, dengan alamat <http://library.polsri.ac.id> dan repository <http://eprints.polsri.ac.id>. Aspek perkembangan IPTEK yang diakomodasi Polsri juga terlihat dari judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (<https://sim.p3m.polsri.ac.id/index.php/login>), judul Tugas Akhir Mahasiswa, dan Judul Program Kreativitas Mahasiswa yang mengikuti perkembangan bidang masing-masing. Learning Management Sistem (LMS) /E-Learning Polsri (<lms.polsri.ac.id>), Software Zoom digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan pendukung didalam pembelajaran. Terdapat berbagai sistem informasi maupun aplikasi yang digunakan Polsri dalam pelaksanaan tridharma sebagai implementasi kemajuan IPTEK antara lain untuk kegiatan pengelolaan penelitian melalui p3m.polsri.ac.id, dosen dan pengajaran (jadwal, nilai, dll) melalui sisak.polsri.ac.id, demikian pula untuk laporan kinerja Dosen (BKD) menggunakan sister.polsri.ac.id.

B. Lingkungan Mikro

Lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, e- learning, pendidikan jarak jauh, *Open Course Ware*, kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi. Kebijakan dan suasana akademik dipengaruhi juga oleh beberapa lingkungan mikro di Polsri. Lingkungan mikro tersebut menjadi poin penting dalam merumuskan berbagai strategi dan kebijakan dalam menyiapkan para lulusan Polsri, khususnya program studi Perancangan Jalan dan Jembatan.



B.1. Aspek pesaing

Sumatera Selatan adalah salah satu propinsi yang terletak dibagian selatan pulau sumatera dengan ibukota Palembang. Terdapat 3 perguruan tinggi negeri, 15 Perguruan Tinggi swasta (Universitas), 43 Sekolah Tinggi, 24 Akademi, dan 6 tingkat Politeknik.

Secara Nasional terdapat 44 Politeknik Negeri dari Aceh (Politeknik Negeri Lhokseumawe) sampai Irian Barat (Politeknik Negeri Fakfak) semua bergabung dalam sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK- PN). Jadi selain kompetitor intake mahasiswa maupun berbagai kompetisi untuk Pendidikan Vokasi, 43 politeknik negeri tersebut bisa menjadi mitra tridharma yang kolaboratif dan saling melengkapi misalkan untuk Penelitian antar PT Vokasi atau peningkatan kompetensi dosen maupun mahasiswa yg termasuk untuk penerapan salah satu program MBKM yaitu kuliah di luar program Studi atau luar kampus.

B.2. Aspek pengguna lulusan

Politeknik Negeri Sriwijaya berdiri 1982 dimana awalnya hanya memiliki 2 jurusan yaitu jurusan Teknik Sipil dan Jurusan Teknik Mesin dan sekarang sudah memiliki 25 program studi dengan jenjang pendidikan Diploma 3, Diploma 4 dan Magister terapan. Para alumni polsri sudah tersebar didalam negeri maupun diluar negeri, dengan berbagai bidang pekerja seperti di Pemerintahan, BUMN, Wiraswasta dan Swasta lainnya. Bekerja di BUMN seperti PT.Pertamina, PT.Wijaya Karya, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT PUSRI, dll; dan di perusahaan swasta PT Chonoco Philip, PT Trakindo, PT Toyota, dll. Bekerja dipemerintahan (PNS) seperti Dinas PU, Dosen, Pemda, Kejaksaan dll.

B3. Aspek sumber calon mahasiswa

Calon mahasiswa Polsri tidak hanya berasal dari Sumsel tetapi berasal dari propinsi lain diseluruh indonesia seperti Propinsi Lampung, Jambi, Bangka Belitung, Padang, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Irian Jaya dan bahkan dari luar negeri seperti dari Tajikistan dan Kamboja. Selain itu juga Polsri melakukan sosialisasi baik secara online melalui web polsri (polsri.ac.id) maupun secara offline yang dilaksanakan oleh humas polsri, program studi maupun melalui para mahasiswa didaerahnya masing-masing. Promosi secara offline juga dilakukan dengan mengundang SLTA, SMK dan Aliyah untuk kunjungan secara langsung ke kampus Polsri. Pada tahun akademik 2022/2023 dimana 94,6 persen mahasiswa baru berasal dari Sumatera Selatan, 2,25% dari Propinsi Riau dan sisanya tersebar dari 19 propinsi yang ada diseluruh indonesia. Banyak peminat dan sebaran asal sumber calon mahasiswa ini tidak terlepas dari promosi



yang terprogram oleh Polsri, masing-masing jurusan/prodi dengan aktivitasnya serta bantuan BEM dan HMJ untuk promosi ke daerahnya masing-masing dan promosi melalui Web Polsri dan Media lainnya.

B4. Aspek sumber calon dosen

Dosen Polsri mempunyai latar belakang pendidikan yang bervariasi dari seluruh Indonesia antara lain: Universitas Sriwijaya, ITB, UGM, IPB, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Universitas Bina Nusantara, Usu dan dari luar negeri antara lain National Chengkung University (Taiwan), Universitas Sain Islam Malaysia, Universitas of Queensland dll. Pengalaman studi dari berbagai wilayah Indonesia dan dan luar negeri memperkaya wawasan dan pengalaman sivitas akademika Politeknik Negeri Sriwijaya dan memperkuat dalam kerjasama tim dilingkungan Polsri. Keberagaman latar belakang pendidikan 529 dosen Polsri dapat memberikan wawasan keilmuan yang luas dan menciptakan suasana akademik kondusif dan inovatif di Polsri.

B5. Aspek Sumber Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan di UPPS Polsri berasal dari berbagai perguruan tinggi yakni Polsri, Universitas Sriwijaya, Universitas Bina Darma dll. Proses pendidikan di lingkungan Polsri ditunjang oleh sejumlah tenaga kependidikan yang ditempatkan di berbagai program studi dan unit kerja yang ada. Saat ini jumlah tenaga kependidikan di lingkungan Polsri sebanyak 195 orang untuk melayani penyelenggaraan pendidikan program diploma III (DIII), program sarjana terapan (DIV) dan pasca sarjana (Magister Terapan). Rasio jumlah tenaga kependidikan terhadap jumlah mahasiswa sebesar 1:20. Ditinjau dari aspek kecukupan rasio ini menunjukkan kecukupan yang sangat memadai untuk menunjang pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polsri. Tingkat kualifikasi pendidikan bagi tenaga kependidikan di Polsri bervariasi mulai dari SLTA sampai S2. Untuk tenaga kependidikan dengan kualifikasi SMA pada umumnya bertugas sebagai tenaga administrasi, pramu gedung, dan teknisi, sedangkan untuk tenaga kependidikan dengan kualifikasi DIII sampai S2 bertugas sebagai laboran, programmer, analis atau tenaga administrasi yang memiliki jabatan fungsional, sehingga dipandang dari aspek kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan beban tugasnya. Dukungan keterampilan para tendik dan kapabilitas baik dalam sistem informasi dan IoT membuat Polsri sangat terbantu dalam menjalankan program-program tri dharma perguruan tinggi. Berkat dukungan kerja tenaga kependidikan yang sangat baik, Polsri Terakreditasi Baik Sekali.

B6. Aspek e-learning

Polsri memanfaatkan e-learning sejak tahun 2010, terus berkembang sehingga



pada tahun 2015 e-learning berperan sebagai komplemen, dan tahun 2020 sebagai pendukung utama proses belajar mengajar. Pemanfaatan e-learning di Polsri berjalan dengan baik karena didukung oleh infrastruktur yang memadai. Selain itu, Polsri memiliki SDM yang kompeten dalam merawat dan mengembangkan fasilitas e-learning. Faktor lain yang mendukung realisasi e-learning adalah tenaga dosen dan mahasiswa yang memiliki adaptasi tinggi terhadap teknologi utama dan pendukungnya. Fasilitas dan pelaksanaan program e-learning sebagai bagian dari proses pendidikan dilengkapi media internet dengan bandwidth sebesar 3 Mbps. Program e-learning dapat terlaksana dengan baik karena adanya pelatihan secara kontinu dan setiap dosen baru didalam workshop metodologi pembelajaran mendapatkan materi e-learning. Program e-learning memfasilitasi dosen berupa RPS, bahan ajar, latihan dan absensi mahasiswa, dengan tersedianya tim pengelola khusus untuk mengelola LMS pelaksanaan dapat berjalan lancar. Sistem pendukung program e-learning ini dapat diakses pada laman <https://lms.learning.Polsri.ac.id>

B.7 Aspek kebutuhan dunia usaha/ industri dan masyarakat

Dengan berkembangnya teknologi yang sangat cepat, dunia pendidikan sulit untuk mengikuti perkembangan IPTEK yang terkini. Dengan mengundang dosen praktisi sebagai pemateri dari industri dan dunia kerja membuka wawasan dan pengetahuan /keterampilan terbaru yang sedang digunakan industri. Setiap program studi Polsri mengundang pihak industri sebagai dosen praktisi baik melalui program praktisi mengajar maupun secara mandiri atau melalui kegiatan HMJ melalui pemberian materi tematik kegiatan ekstra kurikuler untuk melaksanakan kuliah umum. Dosen Polsri juga berperan di masyarakat sebagai asesor BAN PT/ LAM, asesor BKD khususnya untuk internal Polsri. Selain itu, beberapa asesor BKD Polsri juga diminta untuk menilai BKD dari Perguruan Tinggi lain, asesor Sertifikasi Kompetensi LSP, Tenaga Ahli atau manajemen di perguruan tinggi lain.

B.8. Aspek Mitra dan aliansi

Banyaknya mitra dan aliansi yang bekerjasama mengindikasikan tingkat kepercayaan terhadap suatu institusi. Polsri memiliki 32 prodi dengan lokasi kampus terletak di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasi, Kota Baturaja dan di Kabupaten Siak. dengan SDM yang memiliki kepakaran diberbagai bidang keilmuan. Selain itu lokasi Polsri juga berada di kota yang dapat diakses dengan mudah baik dari pusat industri maupun pusat pemerintahan. Hal tersebut menjadi modal penting sehingga berbagai mitra dan aliansi dapat bekerjasama dengan Polsri. Kerjasama mitra dan aliansi dengan Polsri dikoordinasikan oleh UPPM dan Bidang kerjasama Polsri. Proses kerjasama dapat



dilakukan berdasarkan kesepakatan langsung antara mitra dan Polsri atau dari inisiasi dosen yang melakukan penelitian dan PkM

E. Potensi dan Permasalahan

Hasil identifikasi Faktor Eksternal dan posisi ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT untuk pengembangan program studi berupa Peluang dan Ancaman:

Peluang

- 1) Pemda Sumsel dan Pemda Banyuasin menghibahkan lahan untuk pengembangan kampus Polsri
- 2) Peminat calon mahasiswa cukup tinggi
- 3) Kebijakan Pemerintah untuk menambah mahasiswa vokasi
- 4) Peluang kerjasama dengan *stake holder* tinggi
- 5) Dana hibah penelitian baik dari Kemendikbud maupun Kementerian/Lembaga tersedia banyak
- 6) Banyak tersedia sumber daya alam di Sumsel yang dapat diteliti
- 7) Adanya peluang kerja sama penelitian/pengabdian antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri
- 8) Akreditasi jurnal cetak dan e-journal
- 9) Tersedia dana insentif dari Kemendikbud bagi penulisan jurnal terakreditasi dan jurnal internasional.
- 10) Beasiswa yang ditawarkan pemerintah daerah/pusat beserta swasta tinggi
- 11) Kesempatan kerja bagi para alumni luas
- 12) Komitmen Pemerintah propinsi terhadap pengembangan pendidikan tinggi
- 13) Jumlah dan potensi alumni sebagai jejaring Polsri (beasiswa, peluang kerja alumni baru, kolaborasi PPM, investasi) cukup tinggi.

Tantangan

- 1) Globalisasi dan penetrasi Perguruan tinggi lain ke Sumsel
- 2) Makin meningkatnya syarat kualifikasi keahlian untuk bekerja di berbagai sector
- 3) Masyarakat Ekonomi ASEAN Economic Community (AEC)
- 4) Persaingan sesama perguruan tinggi vokasi Indonesia tinggi.
- 5) Dengan sumber PNBPN yang didominasi uang kuliah tunggal, Polsri kesulitan mendanai program dan sarana-prasarana yang padat biaya.
- 6) Banyak lembaga yang menawarkan kerjasama pendidikan dengan UPPS namun tidak berprinsip win-win solution.
- 7) Persaingan perolehan hibah riset dengan PT-PT eksternal semakin ketat.
- 8) Persaingan perolehan hibah PkM dengan PT-PT eksternal semakin ketat.



Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Analisis SWOT untuk Setiap Pemenuhan Standar

Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi Polsri dan menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan menetapkan program pengembangan.

Tabel.1 .1 Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
1) Pemimpin mempunyai sifat leadership yang kuat dan jaringan luas	1) Kelompok bidang Keahlian belum efektif.
2) Mempunyai manajemen yang bagus didukung oleh Organisasi dan Tata kelola (OTK), Deskripsi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan uraian tugas standar operasional prosedur (SOP), serta beberapa Peraturan Direktur yang jelas dan diterapkan.	2) Laboratorium/bengkel belum seluruhnya terakreditasi
3) Mempunyai banyak staf dosen yang berpendidikan S2,S3 dan memiliki sertifikat profesional	3) Implementasi sistem penjaminan mutu internal belum optimal
4) Mempunyai lahan, gedung dan sarana pendidikan yang refresentatif dan terletak di kawasan strategis	4) Peralatan laboratorium dan bengkel perlu peremajaan
5) <i>Free hotspot area.</i> Mempunyai bandwidth 1 GB KBPS untuk akses internet yang dapat melayani semua dosen dan karyawan serta mahasiswa	5) Belum memiliki sistem informasi manajemen seluruh bidang belum terintegrasi
6) Mempunyai fasilitas laboratorium dan bengkel yang memadai.	6) Survey kepuasan pelanggan internal dan eksternal belum dilaksanakan secara rutin.
7) Jumlah Alumni besar yang sudah memiliki jabatan di berbagai posisi dan adanya jejaring alumni	7) Strategi studi pelacakan alumni belum dapat hasil optimal
8) Memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan dapat mensertifikasi kompetensi mahasiswa	8) Banyak tenaga pendidik (Tendik) yang belum menguasai teknologi informasi secara optimal (IT)
9) Mempunyai jurusan dan program studi yang besar (9 jurusan dan 32 prodi) tingkat D3, S1 terapan (D4) dan Magister terapan	9) Audit mutu akademik, kajian, analisis, dan tindak lanjut belum optimal.
10) Polsri termasuk dalam klaster Utama dalam kinerja penelitian dan klaster Manajemen sangat bagus dalam kinerja pengabdian yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti.	
11) Beberapa dosen Polsri sudah ada yang menjadi reviewer nasional bidang penelitian dan pengabdian	



<p>12) 13) Semua jurusan mempunyai jurnal on line (OJS) dan sebagian sudah terakreditasi di sinta.ristekdikti.go.id</p> <p>13) 14) Memiliki perpustakaan pusat dan pada se tiap prodi</p>	
PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemda Sumsel dan Pemda Banyuasin menghibahkan lahan untuk pengembangan kampus Polsri 2) Peminat calon mahasiswa cukup tinggi 3) Kebijakan Pemerintah untuk menambah mahasiswa vokasi 4) Peluang kerjasama dengan <i>stake holder</i> tinggi 5) Dana hibah penelitian baik dari Kemendikbud maupun Kementerian/Lembaga tersedia banyak 6) Banyak tersedia sumber daya alam di Sumsel yang dapat diteliti 7) Adanya peluang kerja sama penelitian/pengabdian antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri 8) Akreditasi jurnal cetak dan e- journal 9) Tersedia dana insentif dari Kemendikbud bagi penulisan jurnal terakreditasi dan jurnal internasional. 10) Beasiswa yang ditawarkan pemerintah daerah/pusat beserta swasta tinggi 11) Kesempatan kerja bagi para alumni luas 12) Komitmen Pemerintah propinsi terhadap pengembangan pendidikan tinggi 13) Jumlah dan potensi alumni sebagai jejaring Polsri (beasiswa, peluang kerja alumni baru, kolaborasi PPM, investasi) cukup tinggi. didominasi uang kuliah tunggal, Polsri kesulitan mendanai program dan sarana-prasarana yang padat biaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Globalisasi dan penetrasi Perguruan tinggi lain ke Sumsel 2) Makin meningkatnya syarat kualifikasi keahlian untuk bekerja di berbagai sector 3) Masyarakat Ekonomi ASEAN Economic Community (AEC) 4) Persaingan sesama perguruan tinggi vokasi Indonesia tinggi. 5) Dengan sumber PNBPN yang 6) Banyak lembaga yang menawarkan kerjasama pendidikan dengan UPPS namun tidak berprinsip win-win solution. 7) Persaingan perolehan hibah riset dengan PT-PT eksternal semakin ketat. 8) Persaingan perolehan hibah PkM dengan PT-PT eksternal semakin ketat



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

A. Visi Politeknik Negeri Sriwijaya

Polsri merumuskan Visi sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi yang Unggul dan Terkemuka.”

Lembaga pendidikan vokasi yang **unggul** mengandung makna terhadap capaian mutu yang mampu bersaing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada keahlian terapan. Sementara yang terkandung pada lembaga pendidikan vokasi yang **terkemuka** yakni terletak pada pencitraan Polsri yang dapat menjadi rujukan, diminati, dan berprestasi.

Adapun yang menjadi indikator untuk **unggul** terletak pada:

1. Proses pendidikan dengan tata kelola yang baik dengan menuju akreditasi institusi dan prodi berpredikat A.
2. Sumber daya manusia yang unggul dalam metodologi pembelajaran dan pada implementasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Memiliki sarana dan prasarana yang berstandar mutu dalam menunjang akademik.
4. Lulusan yang dapat meraih pekerjaan pertama kali rerata kurang dari 6 bulan.
5. Tingginya kuantitas luaran publikasi ilmiah yang dimuat pada jurnal- jurnal bereputasi.
6. Meningkatnya kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Sementara itu yang menjadi indikator untuk **terkemuka** terletak pada:

1. Meningkatnya kuantitas kunjungan kerja ke Polsri dan diberinya mandat oleh Kemenristekdikti untuk menjadi politeknik pembina.
2. Peningkatan peminat seleksi calon mahasiswa terhadap daya tampung, yakni dengan rasio pendaftar dan yang diterima adalah 15 : 1.
3. Secara prestasi, pada implementasi bidang penelitian telah berada pada peringkat “klaster madya”, dan pada bidang pengabdian kepada masyarakat telah berada pada status manajemen “sangat bagus”;
4. Peningkatan kerja sama pada bidang pendidikan yang lulusannya langsung menjadi karyawan di beberapa BUMN dan industri, saat ini telah berlangsung yakni dengan PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Garuda Maintenance Facility, PT. Tanjung Enim Lestari dan PT. Bukit Asam Tbk, PT. Trias Indra Saputra .



B. Misi Politeknik Negeri Sriwijaya

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Polsri menjabarkannya kedalam beberapa **Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lulusan Polsri yang menguasai keahlian baik *softskill* maupun *hardskill* dengan berbasis pada sistem penjaminan mutu internal dan eksternal
2. Meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan jenjang pendidikan, kompetensi, kualitas penelitian dan pengabdian masarakat; dan peningkatan wawasan iptek.
3. Meningkatkan kualitas kurikulum berdasarkan regulasi yang berlaku, metode pembelajaran dan mendukung program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka
4. Meningkatkan kualitas organisasi dan mutu pengelolaan sumber daya Polsri untuk mewujudkan kinerja Polsri yang efektif, efisien dan berkelanjutan

C. Tujuan dan Indikator Tujuan Politeknik Negeri Sriwijaya

Dalam rangkamewujudkan visi dan misi diperlukan kejelasan arah tujuan pengembangan, peningkatan kapasitas dan penguatan program serta kegiatan. Tujuan Pendidikan menjadi luaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di Polsri, yang dirumuskan sebagai berikut:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) dirumuskan berkaitan dengan penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2011-2035 melalui ketetapan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 2175/PL6.4.2/SK/2012 tentang penetapan Rencana Pengembangan Jangka Panjang 2011- 2035, dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 melalui Ketetapan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 3626/PL6.4.2/SK/2020.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah diusahakan menggunakan metode dari unit dan jurusan/prodi (bottom up) melalui rapat kerja (Raker) sehingga aspirasi dari unit dan jurusan/prodi sangat mewarnai kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Aspirasi dari unit dan jurusan tersebut meliputi hampir seluruh kegiatan. Perencanaan dengan pendekatan seperti ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih terarah, berkesinambungan, ekonomis dan tepat guna, mengingat unit dan jurusan adalah pengguna sekaligus perencana yang mengetahui betul sasaran yang diinginkan. Rencana Strategis (Renstra) Polsri 2020-2024 ini dibuat berdasarkan juga atas capaian pada periode sebelumnya. Renstra ini disusun sebagai standar untuk dikembangkan dan dijadikan pedoman Polsri dalam merencanakan kegiatan tahun 2020-2024. Renstra Polsri 2020-2024, mendukung keberhasilan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk



mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Tujuan Penyusunan Renstra Polsri 2020-2024

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian baik softskill maupun hardskill yang diakui oleh DUDI
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran serta kerjasama program studi dengan DUDI
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran serta kerjasama program studi dengan DUDI
4. Menjadikan institusi yang menerapkan *Good Governance*

Hubungan tujuan dan Indikator Kinerja Renstra Polsri 2024 sesuai Kepmendikbudristek 210/M/2023 akan ditampilkan pada tabel 2.1 dibawah

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan, Indikator Kinerja dan Target 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
1.	Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian baik softskill maupun hardskill yang diakui oleh DUDI	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	80%
		Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	30%
2	Meningkatkan kualitas dosen yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI serta keluaran penelitian yang diterapkan masyarakat.	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30.%
		Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	60%
		Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	100 Rasio
3	Meningkatkan kualitas pembelajaran serta kerjasama program	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100 Rasio
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran	95%



	studi dengan DUDI	pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	
		Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5.%
4	Menjadikan institusi yang menerapkan <i>Good Governance</i>	Predikat SAKIP	Predikat BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai 94
		Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai 75

Hubungan Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Sriwijaya ditampilkan pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1.	Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian baik softskill maupun hardskill yang diakui oleh oleh DUDI	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
2	Meningkatkan kualitas dosen yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI serta keluaran penelitian yang diterapkan masyarakat.	Meningkatnya kualitas dosen Politeknik Negeri Sriwijaya
3	Meningkatkan kualitas pembelajaran serta kerjasama program studi dengan DUDI	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
4	Menjadikan institusi yang menerapkan <i>Good Governance</i>	Meningkatnya tata kelola Politeknik Negeri Sriwijaya

D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam menjalankan renstra 2020-2024 Polsri sesuai Kepmendikbudristek 210/M/2023 mempunyai 4 sasaran dengan 11 Indikator Kinerja Sasaran akan ditampilkan pada tabel 2.3 dibawah ini.



Tabel 2,3 Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran/Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Utama
1	SK.1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
		IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi
2	SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
		IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
		IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen
3	SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1
		IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi
		IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
4	SK.4 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	IKU 4.1 Predikat SAKIP
		IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
		IKU 4.3 Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Sriwijaya

Polsri sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan sebagai penjabaran dari Tridarma perguruan tinggi. Arah Kebijakan Tridarma Perguruan Tinggi yang mendukung pencapaian indikator kinerja (IKU) polsri yang diterapkan pada masing-masing bidang mengarah kepada a,l :

1. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi
2. Memperluas Kesempatan Mendapatkan Pendidikan yang layak
3. Terselenggaranya Pendidikan dan Pengajaran yang Relevan Dengan Iptek dan Pasar Kerja
4. Menyelenggarakan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Produktif dan Inovatif dan Berdampak pada Kesejahteraan
5. Tersedianya SDM yang Handal dan Berkualitas Dalam Mendukung Tridarma Perguruan Tinggi
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Program Tridarma Perguruan Tinggi dan Pendukungnya
7. Memperluas Peningkatan Kerjasama dengan External.

Program unggulan Polsri yang menjadi arah kebijakan strategi Polsri yaitu mendukung program Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional. Program Tridharma dibidang pendidikan Polsri memiliki program Sarjana Terapan Teknik Energi (DIV), Program Megister Energi Terbarukan (S2) yang didukung dengan SDM dan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program tersebut dan dibidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat didalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) Program Penelitian dan Pengabdian Energi dijadikan sebagai program prioritas.

B. Kerangka Regulasi

Dalam menjalankan program Tridharmanya polsri dilengkapi dengan peraturan-peraturan dalam bentuk Peraturan Direktur, Buku Pedoman dan Surat Keputusan Direktur Polsri sebagaimana pada kerangka regulasi pada tabel 3.1 dibawah ini:



Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Akademik	Meningkatkan kualitas pembelajaran di Polsri	2021-2024
2	Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No.2 Thn.2017 Tentang Kode Etik Dosen	Meningkatkan kualitas dosen dalam proses pembelajaran di Polsri	2020-2024
3	Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No.4 Thn.2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa	Meningkatkan kualitas dan disiplin mahasiswa dalam pembelajaran di Polsri	2020-2024
4	Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No.3 Thn.2017 Tentang Tenaga Kependidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan Dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran di Polsri	2020-2024

C. Kerangka Kelembagaan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Politeknik Negeri Sriwijaya

Struktur Organisasi Polsri mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam struktur organisai Polsri terdiri dari organ Direktur (Pengelola) yang menjalankan fungsi pengelolaan untuk dan atas nama Menteri, organ Senat yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan bidang akademik, organ Dewan Pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non akademik, dan organ Satuan Pengawas Internal yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non akademik seperti digambarkan pada gambar 2.1.



			<p>Politeknik untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan teknik Politeknik sebagai pedoman pelaksanaan; ▪ Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri; ▪ Melaksanakan pembinaan pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kemampuan; ▪ Menyusun laporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban.
		Wakil Direktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana dan program kerja di bidangnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Memberi tugas kepada Pimpinan Jurusan/Program Studi dan Pimpinan Unit kerja lainnya untuk kelancaran tugas; ▪ Menyelia pelaksanaan tugas Pembantu Direktur dan Pimpinan Unit kerja di lingkungan Politeknik agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; ▪ Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pimpinan Jurusan/Program Studi dan Pimpinan Unit kerja di bidangnya untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; ▪ Menyusun petunjuk teknis di bidangnya sebagai pedoman pelaksanaan; ▪ Melaksanakan kerjasama di bidangnya dengan instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri; ▪ Menyusun laporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya sebagai pertanggung jawaban; ▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/Direktur.
2	Senat Perguruan Tinggi	Senat Akademik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberi pertimbangan terhadap norma akademik, kode etik sivitas akademika, dan ketentuan lain yang diusulkan oleh Direktur; ▪ Mengawasi penerapan norma akademik, kode etik sivitas akademika, dan kebijakan lain yang dilakukan Direktur; ▪ Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu; ▪ Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan; ▪ Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika.
3	Dewan Pertimbangan	Dewan Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan telaahan terhadap kebijakan Direktur di bidang non- akademik;Merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; ▪ Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polsri.



4	Satuan Pengawas	Satuan Pengawas Internal (SPI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana kerja dan program kerja SPI sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Menetapkan kebijakan pengawasan internal di bidang non-akademik; ▪ Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; ▪ Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; dan ▪ Mengajukan saran dan atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
5		Jurusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun konsep rencana dan program kerja Jurusan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Memeriksa beban tugas mengajar dosen setiap semester berdasarkan ketentuan yang berlaku; ▪ Meneliti rencana perkuliahan dan satuan acara perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku; ▪ Menyusun surat penugasan Dosen Wali atau Pembimbing Akademik, sebagai bahan masukan atasan; ▪ Memantau pelaksanaan perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi; ▪ Mengevaluasi hasil pelaksanaan perkuliahan berdasarkan data dan informasi untuk bahan peningkatan mutu; ▪ Memfasilitasi dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Jurusan untuk bahan pengembangan; ▪ Menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas akademik; ▪ Memfasilitasi dosen yang akan melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya; ▪ Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan jurusan sesuai dengan hasil yang akan dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
		Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana dan program kerja Program Studi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Memeriksa beban tugas mengajar dosen setiap semester berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kesesuaiannya; ▪ Meneliti rencana perkuliahan dan satuan acara perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku; ▪ Memantau pelaksanaan perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi; ▪ Mengevaluasi hasil pelaksanaan perkuliahan berdasarkan data dan informasi untuk bahan peningkatan mutu; ▪ Memfasilitasi dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Jurusan untuk



			<p>bahan pengembangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu Ketua Jurusan dalam menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas akademik; ▪ Memfasilitasi dosen yang akan melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya; ▪ Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan program studi sesuai dengan hasil yang akan dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
6	Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung	Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana dan program kerja BAAK sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Membagi tugas kepada Kepala Sub-Bagian di lingkungan BAAK sesuai bidangnya; ▪ Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub-bagian di lingkungan BAAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ▪ Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub-bagian di lingkungan BAAK untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; ▪ Menilai prestasi kerja Kepala Sub- Bagian di lingkungan BAAK sebagai pembinaan dan pengembangan karier; ▪ Menyusun kalender akademik berdasarkan data dan informasi dari jurusan/program studi serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan akademik; ▪ Memantau pelaksanaan penerimaan dan registrasi mahasiswa baru serta pendaftaran ulang untuk mengetahui perkembangannya; ▪ Memantau pelaksanaan layanan administrasi kegiatan dan kesejahteraan mahasiswa untuk mengetahui perkembangannya; ▪ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik, kemahasiswaan, sistim informasi, dan kerjasama berdasarkan data dan informasi untuk mengetahui pencapaian sasaran program;
		Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana dan program kerja BAUK sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Membagi tugas kepada Kepala Sub-Bagian di lingkungan BAUK sesuai bidangnya; ▪ Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub-bagian di lingkungan BAUK sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ▪ Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub-bagian di lingkungan BAUK untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; ▪ Menilai prestasi kerja Kepala Sub- Bagian di lingkungan BAUK sebagai pembinaan dan pengembangan karier; ▪ Memantau pelaksanaan proses mutasi, pengembangan, disiplin dan kesejahteraan



			<p>pegawai di lingkungan Politeknik untuk mengetahui perkembangannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan pengelolaan anggaran Politeknik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ▪ Memantau pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan pengelolaan perlengkapan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ▪ Menyusun laporan bagian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
7	Pelaksana Penjaminan Mutu	Pusat Penjaminan Mutu (PPM)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana kerja dan program kerja penjaminan mutu sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Menyusun/merevisi dokumen mutu yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal; ▪ Merencanakan dan menetapkan standar mutu yang akan digunakan sebagai standar mutu pelaksanaan kegiatan akademik; ▪ Mengendalikan/mengawasi pelaksanaan standar mutu akademik, agar dapat terpenuhi atau bahkan terlampaui; ▪ Melakukan 40ublic kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholder internal (mahasiswa, dosen, dan karyawan) atau stakeholder eksternal (orang tua/wali, masyarakat, dan dunia usaha/41ublic41c) terhadap kinerja Politeknik dii bidang akademik; ▪ Merencanakan dan melakukan audit internal secara 41ublic41c, untuk mengetahui penyimpangan pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan; ▪ Melaporkan hasil 41ublic kepuasan pelanggan dan audit internal kepada Direktur, sebagai bahan dalam menentukan kebijakan selanjutnya; ▪ Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan.
8	Unit Perencana dan Pengembangan Tridarma	Unit Perencanaan dan Program Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana dan program kerja Unit Perencanaan dan Penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Menyusun rencana bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam program perkuliahan semua jurusan/program studi; ▪ Menyusun anggaran atau biaya yang akan diserap oleh semua jurusan/program studi ▪ Mengevaluasi bahan/peralatan dan anggaran/beaya yang terserap di setiap jurusan/program studi; ▪ Membuat laporan kinerja unit sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; ▪ Melaksanakan tugas lain yag ditugaskan oleh



			atasan.
		Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana dan program kerja UPT-Perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Membagi tugas kepada bawahannya sesuai bidangnya; ▪ Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas; ▪ Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pembinaan dan pengembangan karier; ▪ Menyusun rencana pengadaan koleksi bahan pustaka berdasarkan kebutuhan untuk bahan pengembangan perpustakaan; ▪ Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan koleksi bahan pustaka agar sesuai dengan kebutuhan; ▪ Memilih dan menentukan 42public pengolahan teknis dan 42public pelayanan sesuai dengan perkembangan Ilmu Perpustakaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; ▪ Melaksanakan kerjasama silang layanan antar Perpustakaan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan fungsi Perpustakaan; ▪ Mengevaluasi pelayanan dan kelengkapan fasilitas Perpustakaan berdasarkan data dan informasi sebagai bahan penyempurnaan; ▪ Menyusun laporan Perpustakaan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
		Unit pelayanan Teknis Pemeliharaan dan Perawatan (UPT-PP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana dan program kerja UPT-PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Membagi tugas kepada bawahannya sesuai bidangnya; ▪ Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas; ▪ Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pembinaan dan pengembangan karier; ▪ Menerima usul perawatan dan perbaikan sarana penunjang pendidikan sebagai bahan pelaksanaan tugas; ▪ Menyusun daftar nama sarana penunjang pendidikan yang akan dilakukan perawatan dan perbaikan berdasarkan data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan tugas; ▪ Menentukan skala prioritas perawatan dan perbaikan sarana penunjang pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; ▪ Memantau pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana penunjang pendidikan untuk mengetahui perkembangannya; ▪ Memeriksa hasil perawatan dan perbaikan



			<p>sarana penunjang pendidikan sesuai dengan ketentuan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengevaluasi hasil kegiatan UPT-PP berdasarkan data dan informasi untuk bahan perkembangan program; ▪ Menyusun laporan UPT-PP sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
		<p>Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana dan program kerja P3M sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ▪ Membagi tugas kepada bawahannya sesuai bidangnya; ▪ Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas; ▪ Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pembinaan dan pengembangan karier; ▪ Memberi arahan kepada dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian untuk kelancaran tugas; ▪ Mengkoordinasikan seleksi usulan dan pelaksanaan kegiatan P3M agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ▪ Menginformasikan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat kepada dosen untuk diketahui; ▪ Menyusun konsep naskah kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat berdasarkan data dan informasi sebagai bahan masukan atasan; ▪ Memantau pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ▪ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangnya; ▪ Mengkoordinasikan seminar hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; ▪ Mempublikasikan hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk diketahui; ▪ Mengkoordinasikan pembuatan journal ilmiah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; ▪ Menyusun laporan Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Renstra Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun 2020-2024 merupakan implementasi dari Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Sriwijaya 2011-2035 yaitu berada pada phase ke III yaitu Penguatan *output* dan *outcome*. Renstra Polsri 2020-2024 Mempunyai 4 Sasaran Kinerja (SK) dengan 11 Indikator kinerja Utama (IKU). Renstra Polsri 2020-2024 mengalami 3 kali revisi dikarenakan adanya regulasi yaitu berdasarkan Kepmendikbud 754/P/2020, Kepmendikbud 3/M/2021, dan Kepmendikbudristek 210/M/2023. Perubahan renstra polsri 2020-2024 dapat kita lihat pada tabel 4.1, 4.2 dan tabel 4.3

Tabel 4.1 Matrik Kinerja 2020 (Kepmendikbud 754/P/2020):

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target 2020
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi			
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	50.	52
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	8	10.
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi			
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	25	27.
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat	%	5.	15



	kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.			
IKU2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0	1
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran			
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	25	30
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	17.	20
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	0	1
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi			
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	91	92

Tabel 4.2 Matrik Kinerja 2021-2022 (Kepmendikbud 3/M/2021):

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2021	2022
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi	%	55	55	57



	wiraswasta.				
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	20	20	30
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	30	30	32
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	15	16	17
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	1	1	2
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	40
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	25	25	30
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2	2	3
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi				



SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal	Predikat	BB	BB	BB
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93,5	93,5	94

Tabel 4.3 Matrik kinerja 2023-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023):

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2023	2024
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	57	80	80
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	30	30	30
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	32	30	30.
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	17	60	60
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	2	100	100.
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	40	100.	100
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project)	%	30	90	95



	sebagai bagian dari bobot evaluasi				
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	3	5	100
SK 4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
SK 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	AA	BB
SK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	94	94	94
SK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	75

Dengan terbitnya Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 Tentang IKU Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Perlu adanya penyesuaian indikator serta perhitungan target berdasarkan Kepmen tersebut, Perlu ada kesepakatan terkait penetapan target, dan Penyampaian mekanisme penetapan target PK.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan 2024-2024 dengan memproyeksikan pendapatan dan belanja karena proyeksi dan Pagu anggaran tersebut diajukan Polsri melalui Perjanjian Kinerja Direktur dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) beserta indikator capaian pada setiap tahunnya. Realisasi dan Rencana Proyeksi Pendapatan 2020-2024 akan ditampilkan pada tabel 4.4. Sasaran Kinerja dan Pagu anggaran 2020 -2023 akan ditampilkan pada Tabel 4.5 .

Tabel 4.4 Realisasi dan Rencana Proyeksi Pendapatan tahun 2020-2024

Nama Satker	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi								
Politeknik Negeri Sriwijaya	92	94,84	93,5	94,84	94	93,6	94,5	96,01	95	95



Tabel 4.5 Sasaran Kinerja dan Pagu anggaran Polsri 2020-2023 (Dalam Rupiah)
Kerangka Pendanaan 2020-2023

No	Sasaran Kinerja	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Pagu 2023
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	18,488,814,000	111,452,986,000	119,992,402,000	51,371,021,000
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	10,465,420,000	19,787,150,000	25,250,928,000	25,317,302,000
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	17,857,938,000	68,677,675,000	75,191,690,000	38,721,376,000
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	80,339,034,000	89,358,923,000	90,482,798,000	92,186,675,000
	Jumlah	127,151,206,000	289,276,734,000	310,917,818,000	207,596,374,000

Kerangka pendanaan 2024 berdasarkan Kepmendikbudristek 210/M/2023 mempunyai 4 sasaran Kinerja antara lain: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran dan Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri. Hubungan Sasaran Kinerja dan Indikator Kebutuhan anggaran 2024 akan ditampilkan pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikasi Kebutuhan Anggaran 2024 (Rp)
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	49.815.110.000,-
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	18.238.100.000,-
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	34.374.717.000,-
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	97.274.054.000,-
	Jumlah	199.701.981.000,-

Untuk melihat hubungan Sasaran Kegiatan, IKU, Rincian Output (RO) dan komponen kegiatan pengeluaran dana Polsri dapat kita lihat pada tabel 4.6 dibawah ini

Tabel 4.7 Hubungan SK, IKU, RO dan Komponen Kegiatan

Sasaran Kegiatan (SK)	IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rincian Output (RO)	Komponen
Meningkatnya kualitas lulusan	1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang	PT Vokasi penerima Dukungan Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan



pendidikan tinggi		berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	PT Vokasi penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
			Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Penerimaan Mahasiswa Baru
				Wisuda dan Yudisium
				Pemberian Beasiswa
				Pembinaan Karir Mahasiswa
				Kewirausahaan Mahasiswa
			Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran
Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	Revitalisasi Sarana Vokasi SBSN			
Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	Revitalisasi Prasarana Vokasi SBSN			
2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	PT Vokasi penerima Dukungan Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	
		PT Vokasi penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	
		Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Penerimaan Mahasiswa Baru	
			Proses Belajar Mengajar	
			Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan	
Kegiatan Kemahasiswaan				
Kompetisi/Lomba Mahasiswa				
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	PT Vokasi penerima Dukungan Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
			PT Vokasi penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
			Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Proses Belajar Mengajar
				Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan
				Kegiatan Kemahasiswaan
				Kompetisi/Lomba Mahasiswa
			Penelitian (PNBP/BLU Vokasi)	Pelaksanaan Penelitian
Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU Vokasi)	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat			
Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund Hilirisasi Produk Penelitian Terapan (BOPTN Penelitian Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			
4	Persentase dosen yang memiliki	PT Vokasi penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	



	sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	Kinerja Utama (BOPTN Vokasi)		
		Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik	
		Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	Penguatan Program Studi Vokasi (Penguatan D2 Fastrack, Sarjana Terapan, Magister Terapan)	
	5	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan
			Penelitian (PNBP/BLU Vokasi)	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian
				Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian
				Pelaksanaan Penelitian
				Seminar dan Publikasi Penelitian
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian
				Penerbitan Jurnal
Kemitraan dan Kerjasama Penelitian				
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)				
Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU Vokasi)			Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	
	Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat			
	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat			
	Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat			
Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund Hilirisasi Produk Penelitian Terapan (BOPTN Penelitian Vokasi)	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat			
	Kemitraan dan Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat			
		Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan		



Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Kerjasama Berbasis Pendidikan
			Penelitian (PNBP/BLU Vokasi)	Kemitraan dan Kerjasama Penelitian
			Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU Vokasi)	Kemitraan dan Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
	7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	PT Vokasi penerima Dukungan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
			Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Proses Belajar Mengajar
				Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan
				Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik
			Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran
			Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	Revitalisasi Sarana Vokasi SBSN
	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	Revitalisasi Prasarana Vokasi SBSN		
	8	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	PT Vokasi penerima Dukungan Operasional (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
			PT Vokasi penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
			Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan
				Administrasi Pendidikan
				Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik
			Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik
				Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi
			Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan
	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran			
	Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	Penguatan Program Studi Vokasi (Penguatan D2 Fastrack, Sarjana Terapan,		



				Magister Terapan)
Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	9	Predikat SAKIP	PT Vokasi penerima Dukungan Operasional (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
			Dukungan Layanan Pembelajaran	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan
				Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan
	10	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	PT Vokasi penerima Dukungan Operasional (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
			Dukungan Layanan Pembelajaran	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan
	11	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75.	PT Vokasi penerima Dukungan Operasional (BOPTN Vokasi)	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Dukungan Layanan Pembelajaran			Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan	



BAB V PENUTUP

A. Pedoman Pelaksanaan

Rencana Strategis 2020-2024 Politeknik Negeri Sriwijaya disusun agar menjadi acuan dasar program yang sedang dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Untuk pelaksanaan jangka pendek harus dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh setiap Jurusan/bagian/sub bagian dan pada akhir setiap pelaksanaan program jangka pendek dibuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) sehingga dapat dievaluasi tingkat keberhasilan pada setiap program.

Renstra polsri 2020-2024 akan menentukan arah program kegiatan dalam membangun kapabilitas institusi melalui peningkatan sumber daya yang keberlanjutan serta penguatan tata kelola yang memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan. Pelaksanaan program penguatan tata kelola diharapkan akan meningkatkan kapabilitas institusi dalam menjalankan mandat dan fungsinya sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Melalui pelaksanaan pada setiap indikator renstra diharapkan dapat mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam keadaan terjadi perubahan lingkungan strategis dan adanya perubahan regulasi sehingga Rencana Strategis menghadapi kendala dalam mencapai indikator kinerjanya, maka dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan polsri yang diajukan kepada Senat Polsri untuk mendapatkan persetujuan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Visi Polsri untuk menjadi Menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi yang Unggul dan Berkemuka. dapat diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta dukungan pendanaan yang memadai. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Norma-norma tersebut sebagai acuan sivitas akademika Polsri dalam menjalankan program kerja selama 5 tahun dan dituangkan didalam perjanjian kinerja direktur pada setiap tahunnya dan secara operasional dituangkan didalam Rencana Kerja Tahunan.

Lampiran 1

Tabel Matrik Kinerja dan Pendanaan Kempendikbud 754/P/2020, Kepmendikbud 3/M/2021 dan Kepmendikbudristek 210/M/2023

Tabel 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan (Kempendikbud 754/P/2020)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Base line	Target					Alokasi					Pelaksanaan
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi													
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	50	52	55	57	60	65	9,244,407,000	55,726,493,000	60,390,881,000	28,856,562,000	28,090,999,000	Bidang: Kemahasiswaan
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	8	10	20	30	40	45	9,244,407,000	55,726,493,000	59,601,521,000	22,514,459,000	20,905,111,000	Bidang Kemahasiswaan
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi													
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	25	27	30	32	34	32	4,254,960,000	6,741,916,000	7,841,314,000	7,540,990,000	6,424,426,000	Bidang: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi	%	5	15	16	17	20	40	5,659,011,000	11,796,524,000	16,370,323,000	16,949,522,000	11,120,342,000	Bidang: Pendidik dan Tenaga Kependidikan

	profesional, dunia industri, atau Odunia kerja.														
IKU2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0	1	1	2	3	5	551,449,000	1,248,710,000	1,039,291,000	826,790,000	693,332,000	Bidang: Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran														
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	25	30	35	40	45	50	4,254,963,000	6,741,916,000	7,841,316,000	7,540,990,000	6,424,430,000	Manajemen	
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	17	20	25	30	35	40	6,439,409,000	7,857,296,000	9,173,679,000	10,256,288,000	9,989,169,000	Akademik	
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	0	1	2	3	3	5	7,163,566,000	54,078,463,000	58,176,695,000	20,924,098,000	17,961,118,000	Program Studi	
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi														
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	AA	BB	80,339,034,000	89,358,923,000	90,482,798,000	92,186,675,000	97,274,054,000	Bidang Manajemen	
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	91	92	93,5	94	94,5	95							

Tabel 2 .Matrik Kinerja Dan Pendanaan (Kepmendikbud 3/M/2021):

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana					Pelaksanaan
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi														
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	50	52	55	57	60	65	9,244,407,000	55,726,493,000	60,390,881,000	28,856,562,000	28,090,999,000	Bidang: Kemahasiswaan
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	5	15	16	17	20	40	9,244,407,000	55,726,493,000	59,601,521,000	22,514,459,000	20,905,111,000	Bidang Kemahasiswaan
SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi														
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	25	27	30	32	34	32	4,254,960,000	6,741,916,000	7,841,314,000	7,540,990,000	6,424,426,000	Bidang: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	5	15	16	17	20	40	5,659,011,000	11,796,524,000	16,370,323,000	16,949,522,000	11,120,342,000	Bidang: Pendidik dan Tenaga Kependidikan

IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0	1	1	2	3	5	551,449,000	1,248,710,000	1,039,291,000	826,790,000	693,332,000	Bidang: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran														
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	25	30	35	40	45	50	4,254,963,000	6,741,916,000	7,841,316,000	7,540,990,000	6,424,430,000	Manajemen
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	17	20	25	30	35	40	6,439,409,000	7,857,296,000	9,173,679,000	10,256,288,000	9,989,169,000	Akademik
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	0	1	2	3	3	5	7,163,566,000	54,078,463,000	58,176,695,000	20,924,098,000	17,961,118,000	Program Studi
SK.4 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi														
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	AA	BB	80,339,034,000	89,358,923,000	90,482,798,000	92,186,675,000	97,274,054,000	Bidang Manajemen
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	91	92	93,5	94	94,5	95						

Tabel Matrik kinerja dan Pendanaan (Kepmendikbudristek 210/M/2023):

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target					Alokasi					Pelaksanaan
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi														
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	50	52	55	57	80	80	9,244,407,000	55,726,493,000	60,390,881,000	28,856,562,000	28,090,999,000	Bidang: Kemahasiswaan
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	8	10	20	30	30	30	9,244,407,000	55,726,493,000	59,601,521,000	22,514,459,000	20,905,111,000	Bidang Kemahasiswaan
SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi														
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	25	27	30	32	30	30	4,254,960,000	6,741,916,000	7,841,314,000	7,540,990,000	6,424,426,000	Bidang: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	5	15	16	17	60	60	5,659,011,000	11,796,524,000	16,370,323,000	16,949,522,000	11,120,342,000	Bidang: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	0	1	1	2	100	100	551,449,000	1,248,710,000	1,039,291,000	826,790,000	693,332,000	Bidang: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran														
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	25	30	35	40	100	100	4,254,963,000	6,741,916,000	7,841,316,000	7,540,990,000	6,424,430,000	Manajemen

IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	17	20	25	30	50	95	6,439,409,000	7,857,296,000	9,173,679,000	10,256,288,000	9,989,169,000	Akademik
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	0	1	2	3	5	100	7,163,566,000	54,078,463,000	58,176,695,000	20,924,098,000	17,961,118,000	Program Studi
	Jumlah SK 3								17,857,938,000	68,677,675,000	75,191,690,000	38,721,376,000	34,374,717,000	-
SK.4 Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri														
SK 4.1	Predikat SAKIP	Pre dika t	BB	BB	BB	BB	AA	BB	80,339,034,000	89,358,923,000	90,482,798,000	92,186,675,000	97,274,054,000	Bidang Manajemen
SK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	91	92	93,5	94	94	94						
SK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	-	-	-	75						
	Jumlah SK 4								80,339,034,000	89,358,923,000	90,482,798,000	92,186,675,000	97,274,054,000	

Lampiran 2
Kerangka Regulasi Politeknik Negeri Sriwijaya

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	PIC	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Akademik	Meningkatkan kualitas pembelajaran di Polsri	Wakil Direktur I	Jurusan/ Program Studi	2021-2024
2	Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No.2 Thn.2017 Tentang Kode Etik Dosen	Meningkatkan kualitas dosen dalam proses pembelajaran di Polsri	Wakil Direktur I dan II	Jurusan/Program Studi	2020-2024
3	Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No.4 Thn.2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa	Meningkatkan kualitas dan disiplin mahasiswa dalam pembelajaran di Polsri	Wakil Direktur III	Jurusan/Program Studi, bag.kemahasiswaan	2020-2024
4	Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No.3 Thn.2017 Tentang Tenaga Kependidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan Dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran di Polsri	Wakil Direktur I dan II	Jurusan, Bagian, Pusat dan Unit	2020-2024

Lampiran IKU Dan Definisi Operasional

Indikator Kinerja, Sasaran, Satuan, Sumber Data, PIC dan Penanggung Jawab IKU					
No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria Formula	Satuan	Sumber Data	
				Aplikasi	PIC Dan Penanggung Jawab
Sasaran: Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi					
1	Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4 / D3/ D2 / DI yang berhasil: a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta	<p>a. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekedaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup compang) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2) organisasi nirlaba; 3) institusi/organisasi multilateral; 4) lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) <p>b. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. No Indikator Kinerja a Definisi, Kriteria, dan Formula Satuan</p> <p>c. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder, perusahaan; atau 2) pekerja lepas (freelancer). 	%	Tracer Studi DIKTI	Unit Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Wadir III

		<p>Formula:</p> $\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</p> <p>k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulus bekerja dalam mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).</p>			
2	<p>Mahasiswa berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi:</p> <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang:</p> <p>a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau</p> <p>b. meraih prestasi</p>	<p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2.</p> <p>Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dipedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. Pertukaran pelajar: 	%	PD Dikti & SIDAKIN	<p>Bagian Akademik dan Perencanaan</p> <p>Wadir I dan II</p>

		<p>g. Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</p> <p>h. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>i. Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersamasama dengan mahasiswa lain.</p> <p>j. Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>k. Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penangan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).</p> <p>l. Bela negara:</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <p>a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait; dan/ atau</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.</p> <p>b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional-1. <p>Formula:</p> <p>a. Perguruan Tinggi Negeri Akademik</p> <p>Formula:</p> <p>a. Perguruan Tinggi Negeri Akademik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>* = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>Perguruan Tinggi Negeri Vokasi</p> <p>1) Formula untuk Politeknik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{2n} k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{3n} k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>2) Formula untuk Akademi Komunitas</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{2n} k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a₁= jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>a₂= jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>a₃=jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib.</p> <p>b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minima-1.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>X = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).</p>			
Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi					
3	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di	<p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu 	%	SISTER & PD Dikti	PPP ; Akademik ; Kepegawaian Wadir I dan II

<p>perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p>	<p>tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan</p> <p>3) organisasi luar kampus; dan dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.</p> <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <p>1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.</p> <p>2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.</p> <p>3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.</p> <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <p>1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu (part time) di:</p> <ol style="list-style-type: none"> perusahaan multinasional; perusahaan swasta berskala menengah ke atas; perusahaan teknologi global; perusahaan rintisan (startup company) teknologi; organisasi nirlaba nasional dan internasional; institusi/organisasi multilateral; 			
--	--	--	--	--

		<p>g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Menjadi wiraswasta pendiri founder)atau pasangan pendtri (co-founder) di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perusahaan multinasional; b. perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c. perusahaan teknologi global; d perusahaan rintisan (staftup companA) teknologi; atau d. organisasi niriaba nasional dan internasional. <p>3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (founder)atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar. d) Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. e) Dosen yang membimbing mahasiswa da-lam kurun waktu 1 (satu) ta-hun terakhir: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional. 			
--	--	---	--	--	--

		<p>Formula:</p> $\frac{\sum_1 n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>1 = jumlah dosen dengan NIDN</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya</p>			
4	<p>Kualifikasi dosen/pengajar:</p> <p>a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau</p> <p>b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri</p>	<p>a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi</p> <p>Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. <p>b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi</p> <p>Pra-ktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup/company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; 		SISTER & PD Dikti	<p>Bagian Kepegawian dan Bagian Akademik</p> <p>Wadir I</p>

- g) lembaga pemerintah; atau
- h) BUMN/BUMD.

2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:

- a) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
- b) perusahaan teknologi global;
- c) perusahaan rintisan (startup) teknologi; atau
- d) organisasi nirlaba nasional dan internasional.

3) Menjadi pekerja lepas (freelancer).

4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:

- a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
- b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
- c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sangat.

Formula:

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$$

- a) jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.
 - b) jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
- 1 = jumlah dosen dengan NIDN.
 y = jumlah dosen dengan NIDK.
 2 = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).

5	<p>Penerapan karya dosen: Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</p>	<p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter)dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus; 3) studi kasus; dan/atau 4) laporan penelitian untuk mitra.</p> <p>b. Karya terapan, terdiri atas: 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra.</p> <p>c. Karya seni, terdiri atas: 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis nove1, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari. daerah).</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i^t n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional-l atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p>	%	SISTER	<p>Bagian Kepegawaian dan PPP</p> <p>Wadir I dan II</p>
6	<p>Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama program studi SI</p>	<p>a- Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk: 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output)pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</p>	%	SIKERMA	<p>Humas dan Hub. Internasional</p> <p>Wadir IV</p>

	D4ID3/D2IDr. per dan	<p>2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ;</p> <p>3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</p> <p>4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;</p> <p>5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;</p> <p>6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;</p> <p>7) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana;</p> <p>8) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus;</p> <p>9) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan atau</p> <p>10) melakukan kemitraan penelitian</p> <p>b. Kriteria mitra:</p> <p>a. perusahaan multinasional;</p> <p>b. perusahaan nasional berstandar tinggi;</p> <p>c. perusahaan teknologi global;</p> <p>d. perusahaan rintisan (startup compang) teknologi;</p> <p>e. organisasi nirlaba kelas dunia;</p> <p>f. institusi/organisasi multilateral;</p> <p>g. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu subject);</p> <p>h. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;</p> <p>i. instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD;</p> <p>j. rumah sakit;</p> <p>k. UMKM;</p> <p>l. lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau</p> <p>m. lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.</p> <p>2) (QS200 by</p>			
--	----------------------------	--	--	--	--

		<p>Formula</p> $\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 d,at D4 /D3ID2ID1 yang memenuhi kriteria t = jumiah program studi S1 d,anD4/D3/D2/DI. k = konstalta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p>			
7	<p>Pemtrelej ararr dalam kelas: Persentase mata kuliah S 1 dan D4ID3ID2IDr yang menggunakan metode pembelajaran pemeca.han kasus (ca.se method) atau pembelajaran keiompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi</p>	<p>a. Kriteria metode pembelaj aran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus Ircase method)atau pembelajaran kelompok berbasis project (te am-based proj ect).</p> <p>1) Pemecahan kasus /case methodli</p> <p>a) mahasiswa berperan sebagai 'protagonis" yang berusaha untuk memeca-hkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaax, dan observas</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project):</p> <p>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari I (satu) mahasiswa untuk mengerja-kan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;</p>	%	PD Dikti	<p>Bagian Akademik Waditr I</p>

		<p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau</p> <p>e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.</p> <p>b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas /case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (teambased project).</p> <p>Formula: $n/t \times 100$</p> <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan</p>			
8	<p>Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.</p>	<p>Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Institusi akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>Formula: $n/t \times 100$</p> <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. T = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (satu)</p>	%	PD Dikti	<p>Bagian Akademik Wadiri</p>

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Definisi

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebuah pengukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisien instansi pemerintah dalam mengelola APBN. Sebagai pengguna APBN, instansi pemerintah wajib mengelolanya dengan kredibel, akuntabel dan *sustainable*. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, bahan pertimbangan penyesuaian kebijakan tahun berjalan, pengendalian belanja negara dan peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.

Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran terdiri atas kualitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Kualitas pelaksanaan anggaran merupakan kesiapan pelaksanaan anggaran, perkembangan realisasi anggaran, capaian keluaran, dan kendala yang dihadapi. Sedangkan regulasi pelaksanaan anggaran meliputi regulasi mengenai pelaksanaan anggaran dan pengelolaan anggaran.

Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran sebagaimana dilakukan melalui aktivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari: 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran

Formula Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran:

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

$$NKA = [50\% EKA] + [50\% IKPA]$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran

EKA : Evaluasi Kinerja Anggaran (Kinerja Perencanaan Anggaran)

IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Bobot Penilaian EKA/kinerja perencanaan anggaran tingkat satuan kerja terdiri dari 75% bobot efektivitas dan 25% bobot efisiensi. Dimana EKA, efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$EKA = 75\% \text{ Efektivitas} + 25\% \text{ Efisiensi}$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)}}{\text{Target Volume Rincian Output (TVRO)}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 10\% \text{ Penggunaan SBK} + 15\% \text{ Efisiensi SBK}$$

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Dalam rangka mendorong akselerasi belanja, penguatan *fairness treatment*, dan penyempurnaan aspek penilaian kinerja, telah dilakukan reformulasi IKPA tahun 2024:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 ((\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}) - \text{Nilai indikator Dispensasi SISPM}$$

Indikator	Kualitas Perencanaan		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
Bobot	10%	15%	20%	10%	10%	10%	Pengurang Nilai IKPA	25%

Satuan	Nilai
Tipe Perhitungan	Progresif/Kumulatif
Unit Pelaksana	PTN Vokasi
Sumber Data	Aplikasi SMART Kemenkeu, Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu, Aplikasi Spasikita
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Bulanan

IKU: Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama adalah minimal 75

Definisi :

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Syara	Menuju WBK	Komponen nilai
Nilai Total	75	
Nilai Minimal Pengungkit	40	

Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.
Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25	
a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan
b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,5	
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan

Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.

Penilaian	Bobot
1. Manajemen Perubahan	8%
2. Penataan Tata Laksana	7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5. Penguatan Pengawasan	15%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing- masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1- 4.

Unit Pelaksana:

Politeknik Negeri dan AKN dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Metode Penghitungan:

Formula:

Target IKU= (60% \times Komponen Pengungkit) + (40% \times Komponen Hasil)

Komponen Pengungkit terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform

Komponen Hasil terdiri atas : Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.

Satuan : Persen

Tipe Perhitungan : Nonkumulatif

Sumber Data : Aplikasi SiAzik